

PAJAK PENGHASILAN (PPH pasal 21) lanjutan

FEB
UNISMA

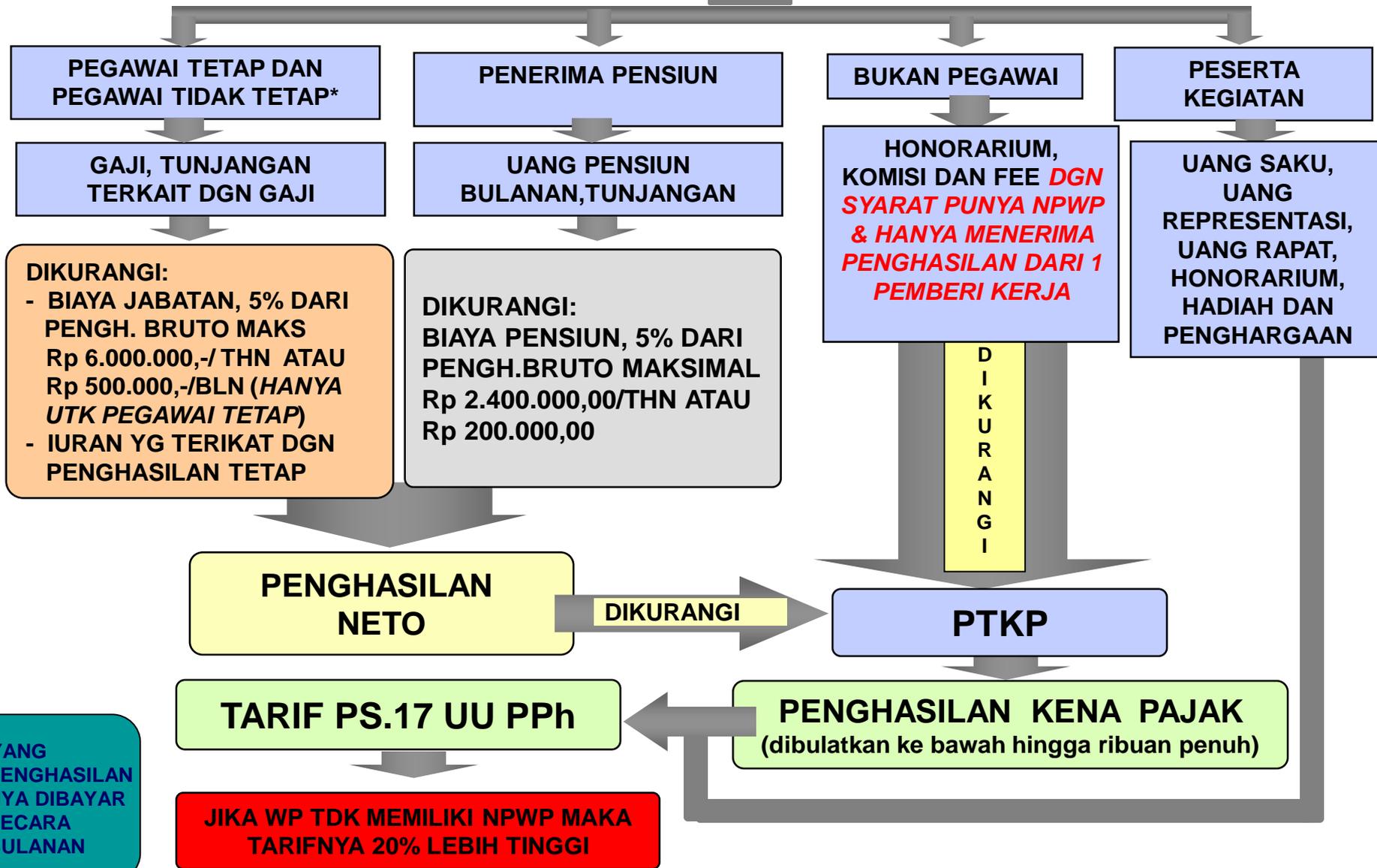


Dosen

Hj. Jeni Susyanti, SE, MM, BKP

RESUME PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

PENGHASILAN BRUTO



1. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Pegawai Tetap

a. Dengan Gaji Bulanan

- 1) Ramaditya Khadifa, pada 2020, bekerja pada perusahaan PT Suksesindo dengan memperoleh gaji sebulan Rp5.700.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00. Ramaditya Khadifa menikah, tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp5.700.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan:		
5% x Rp5.700.000,00	Rp285.000,00	
2. Iuran pensiun	<u>Rp100.000,00</u>	
		<u>Rp385.000,00</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp5.315.000,00
Penghasilan neto setahun adalah:		
12 x Rp5315.000,00		Rp63.780.000,00

PTKP setahun	
- untuk WP sendiri (PTKP Terbaru)	Rp54.000.000,00
- tambahan WP kawin	<u>Rp4.500.000,00</u>
	<u>Rp58.500.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp5.280.000,00

PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp5.280.000,00	Rp264.000,00
PPh Pasal 21 sebulan	
Rp264.000,00 : 12 =	Rp22.000,00

Catatan:

- Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
- Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar: $120\% \times \text{Rp } 29.500,00 = \text{Rp } 35.400,00$.
- Untuk contoh-contoh selanjutnya diasumsikan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sudah memiliki NPWP, kecuali disebut lain dalam contoh tersebut.

- 2) Reza Ardian, pegawai pada perusahaan PT Menara Buana, menikah tanpa anak dan memperoleh gaji Rp6.500.000,00 sebulan. PT Yasa Buana mengikuti program Jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Menara Buana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Reza Ardian membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Menara Buana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Menara Buana membayar iuran pensiun untuk Reza Ardian ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00. Sedangkan, Reza Ardian membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21:

Gaji sebulan		Rp6.500.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp32.500,00
Premi Jaminan Kematian		<u>Rp19.500,00</u>
Penghasilan bruto		Rp6.552.000,00
1. Pengurangan:		
Biaya jabatan		
5% x Rp6.552.000,00	Rp327.600,00	
2. Iuran Pensiun	Rp50.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	<u>Rp130.000,00</u>	
		<u>Rp607.600,00</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp5.944.400,00
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp5.944.00,00		Rp1.332.800,00

PTKP

- untuk WP sendiri	Rp54.000.000,00	
- tambahan WP kawin	<u>Rp4.500.000,00</u>	
		<u>Rp58.000.000,00</u>
Penghasilan kena pajak setahun		Rp13.328.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp13.328.000,00 =	Rp666.640,00	
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp666.640,00 : 12 =	Rp55.553,34	

Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir

**PPH Pasal 21
terutang atas
seluruh Penghasilan
Kena Pajak selama 1
Tahun atau bagian
tahun pajak**

**PPH Pasal 21
Yg telah dipotong
pada masa-masa
sebelumnya
dalam tahun pajak
ybs**

**PPH Pasal 21
Masa Pajak
Terakhir**

Contoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan terjadi pada bulan Desem. sebesar Rp1.500.000 shgg menjadi Rp5.000.000)

$$\begin{aligned}
 & (Rp3.500.000 \times 11 + Rp5.000.000) - \\
 & [(5\% \times (Rp3.500.000 \times 11 + \\
 & Rp5.000.000) + Rp600.000)] - \\
 & Rp15.840.000 = Rp43.500.000 - \\
 & (Rp2.175.000 + Rp600.000 \\
 & + Rp24.300.000) = \\
 & Rp43.500.000 - Rp18.615.000 \\
 & = Rp24.885.000
 \end{aligned}$$

X

$$\begin{aligned}
 & 5\% \times Rp24.885.000 = \\
 & \mathbf{Rp12.442.500}
 \end{aligned}$$

Rp 687.500*

***Rp62.500/BULAN X 11**

Rp133.750

- 2) Reza Ardian, pegawai pada perusahaan PT Menara Buana, menikah tanpa anak dan memperoleh gaji Rp6.500.000,00 sebulan. PT Yasa Buana mengikuti program Jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Menara Buana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Reza Ardian membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Menara Buana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Menara Buana membayar iuran pensiun untuk Reza Ardian ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00. Sedangkan, Reza Ardian membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00

T
u
g
a
s
1

Dengan gaji yang sama setiap bulan hitung PPh 21 yang dipotong pada masa Desember!!!!!!

Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur



PERHITUNGAN PPh 21 atas Bonus/THR			
contoh:			
Anton Suherman		PTKP (TK/0)	
<i>gaji Rp 6,5 Juta perbulan</i>			
<i>tunjangan 250.000perbulan</i>			
iuran pensiun 2% -- kary; perusahaan 3,7%			
iuran pensiun ===BPJS, pada saat menerima pensiun merupakan obyek PPh 21			
Tunjangan Hari Raya THR sebesar 1 kali gaji			
PPh 21 atas gaji dan THR (penghasilan setahun)			
Gaji (Rp.6.500.000)		6.500.000	
tunjangan (Rp.250.000)		250.000	
Penghasilan Bruto		6.750.000	
Bonus		-	
THR		6.500.000	
Penghasilan Bruto dg THR		13.250.000	
Pengurangan:			
a Biaya Jabatan : 5%		662.500	
b iuran pensiun BPJS ditanggung sendiri :2%		135.000	
Penghasilan Netto dg THR			12.452.500
Penghasilan Netto disetahunkan dg THR			149.430.000
PTKP (TK/0)			54.000.000
Penghasilan kena pajak setahun dengan THR			95.430.000
PPh 21 terhutang setahun dengan THR			-
Tarif pasal 17	5%	50.000.000	2.500.000
	15%	45.430.000	6.814.500
			9.314.500

			9.314.500	
PPh 21 atas gaji				
Gaji (Rp.6.500.000)		6.500.000		
tunjangan (Rp.250.000)		250.000		
Penghasilan Bruto		6.750.000		
Bonus		-		
THR		-		
Penghasilan Bruto dg THR		6.750.000		
Pengurangan:				
Biaya Jabatan : 5%		337.500		
iuran pensiun BPJS		135.000		
Penghasilan Netto			6.277.500	
Penghasilan Netto disetahunkan			75.330.000	
PTKP (TK/0)			54.000.000	
Penghasilan kena pajak			21.330.000	
PPh 21 terhutang setahun			-	
	5%		1.066.500	
		selama 1 tahun	1 bulan	
PPh 21 atas Bonus				
PPh 21 atas gaji dan THR setahun		6.814.500	567.875	
PPh 21 atas gaji		1.066.500	88.875	
PPh 21 atas THR/12			479.000	

DASAR PENGHITUNGAN PPh Ps. 21

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
PEGAWAI TETAP
WP DALAM NEGERI

SEJAK AWAL
TAHUN

MULAI BEKERJA SETELAH BULAN
JANUARI TERMASUK PEGAWAI YG
SEBELUMNYA BEKERJA PADA
PEMBERI KERJA LAINNYA

JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH
DALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM

**TIDAK
DISETAHUNKAN**

CONTOH :
SI A KERJA MULAI BLN JULI
DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JT
MAKA PENGHITUNG PPh PSL 21
ADALAH $(Rp\ 10\ JT - [(BIAYA\ JAB.PERBLN + IURAN\ PENS/BLN)] \times 6\ BLN) - PTKP$
 \times TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN

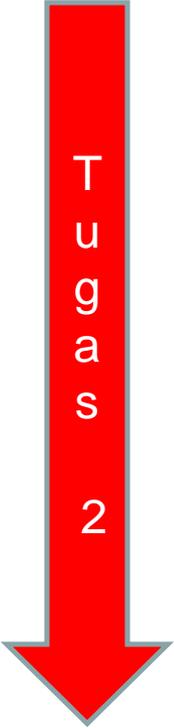
SETELAH PERMULAAN
TAHUN PAJAK

MULAI BEKERJA
DALAM TAHUN
BERJALAN

PENGHASILAN KENA PAJAK
YG DISETAHUNKAN

CONTOH :
ARIF MULAI BEKERJA BLN JULI , PENGHSL
Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh
PSL 21 SELAM 6 BLN : $(Rp\ 10\ jt - [(BIAYA\ JAB.PERBLN + IURAN\ PENS/BLN)] \times 12) - PTKP \times$
TARIF PSL 17 : 6 BLN

- 1) Ramaditya Khadifa, pada 2020, bekerja pada perusahaan PT Suksesindo dengan memperoleh gaji sebulan Rp5.700.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00. Ramaditya Khadifa menikah, tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:



T
u
g
a
s

2

**JIKA RAMADITYA MULIA KERJA MULAI BLN JULI 2020,
HITUNG PPh 21 yang harus dipotong**

Penghitungan PPh Pasal 21

ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN
UANG SAKU HARIAN

Tdk termasuk
Honorarium atau
Komisi yg diterima
Penjaja barang &
Petugas dinas luar

DIBAYAR HARIAN

TIDAK LEBIH DARI
Rp 450.000,-

LEBIH DARI
Rp 450.000,-

TIDAK DIPOTONG
PPh Ps.21

DIKURANGI
Rp 450.000,-

DIPOTONG PPh
TARIF 5%

PADA SAAT TELAH MELEBIHI
Rp 4.500.000 DALAM SATU BULAN KALENDER

DIKURANGI
PTKP HARIAN SEBENARNYA +

Iuran Jaminan Hari Tua/
Iuran Tunjangan Hari Tua
yg dibayarkan ke Jamsostek,
bila diwajibkan

PKP

TARIF PPh 17

JIKA PENGHASILAN
KUMULATIF DLM
1 BLN \geq Rp 4.500.00

DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21
YANG TELAH DIPOTONG

JIKA WP
TDK
MEMILIKI
NPWP
MAKA
TARIFNYA
20% LEBIH
TINGGI

**CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN,
TENAGA HARIAN LEPAS
PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN**

Sentot (TK) Januari 2017 bekerja selama 12 hari dan menerima upah harian sebesar Rp450.000,-

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

Upah sehari

Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh:

Penghasilan Kena Pajak sehari

PPh Pasal 21 dipotong atas Upah sehari:

Rp 450.000,00

Rp 450.000,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Sd hari ke-10, jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp4.500.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp4.500.000,00 maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

Upah s.d hari ke-11 (Rp450.000,00 x 11)	Rp 4.950.000,00
PTKP sebenarnya:	
9 x (Rp54.000.000,00/360)	<u>Rp 1.350.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak s.d hari ke-11	Rp 3.600.000,00

PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11	
5% x Rp3.600.000,00	Rp 180.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10	<u>Rp 0,00</u>

PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 Rp 180.000,00

Sehingga pada hari ke-11, upah bersih yang diterima Sentot sebesar:

Rp450.000,00 – Rp180.000,00 =Rp 270.000,00

CAT: berdasar PER 31/2012 pasal 21, dalam hal penghasilan Rp.450.000/hari, Jumlah Rp.450.000,- mrpkan jml yang dapat dikurangkan dr penghasilan bruto

Pada hari kerja ke-12, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah:

Upah sehari Rp 200.000,00

PTKP sehari

- untuk WP sendiri (Rp24.300.000,00 : 360) Rp 67.500,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 132.500,00

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp132.500,00 Rp 6.625,00

Sehingga pada hari ke-12, Sentot menerima upah bersih sebesar:

Rp200.000,00 – Rp6.625,00 = Rp 193.375,00

JIKA SENTOT TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA DIPOTONG PPh 20% LEBIH TINGGI

Penghitungan PPh Pasal 21

ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,
SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN

DIBAYAR BULANAN

DIKURANGI PTKP SEBULAN

PKP SEBULAN

PKP DISETAHUNKAN
X
TARIF PPh Ps.17

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP
MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

PPh SETAHUN

PPh SEBULAN

**TENAGA AHLI YG
MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS
(BUKAN PEGAWAI)**

TERDIRI DARI :

- PENGACARA
- AKUNTAN
- ARSITEK
- DOKTER
- KONSULTAN
- NOTARIS
- PENILAI
- AKTUARIS

MENERIMA PENGHASILAN BERUPA

**HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA
DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN**

**DASAR PENGENAAN &
PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 ADALAH
50% DARI JUMLAH
PENGHASILAN BRUTO**

**DIPOTONG PPh PS.21
DENGAN TARIF PASAL 17
DARI DASAR PENGENAAN &
PEMOTONGAN PPh PASAL 21**

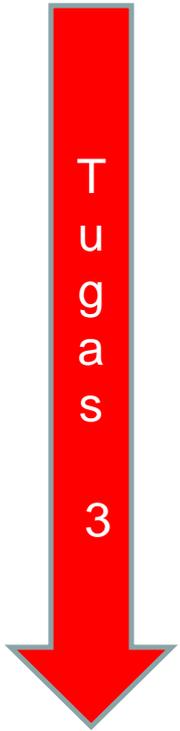
**JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI**

Ibu AJS adalah Konsultan Pajak , dengan pekerjaan pada beberapa klien

kontrak dengan PT XYZ pada tahun 2020

fee perbulan Rp.50.000.000,-

bln	Penghsln Bruto	DPP	tarif	PPh 21	Keterangan	jumlah fee yang dibayarkan pada ibu AJS
1	50.000.000	25.000.000	5%	1.250.000	dipotong oleh PT XYZ dan ibu AJS mendapat bukti potong PPh 21 setiap bulan	48.750.000
2	50.000.000	25.000.000	5%	1.250.000		48.750.000
3	50.000.000	25.000.000	15%	3.750.000		46.250.000
4	50.000.000	25.000.000	15%	3.750.000		46.250.000
5	50.000.000	25.000.000	15%	3.750.000		46.250.000
6	50.000.000	25.000.000	15%	3.750.000		46.250.000
7	50.000.000	25.000.000	15%	3.750.000		46.250.000
8	50.000.000	25.000.000	15%	3.750.000		46.250.000
9	50.000.000	25.000.000	15%	3.750.000		46.250.000
10	50.000.000	25.000.000	15%	3.750.000		46.250.000
11	50.000.000	25.000.000	25%	6.250.000		43.750.000
12	50.000.000	25.000.000	25%	6.250.000		43.750.000
	600.000.000			45.000.000		



Bagaimana jika ibu AJS memperoleh fee sebesar Rp.27.500.000 perbulan?

**IMBALAN KEPADA BUKAN PEGAWAI
YANG TIDAK MEMILIKI NPWP ATAU
DIBAYARKAN TIDAK BERKESINAMBUNGAN***

**HONORARIUM, KOMISI, FEE,
DAN IMBALAN SEJENISNYA DENGAN NAMA DAN
DALAM BENTUK APAPUN APAPUN**

DITERIMA

BUKAN PEGAWAI

- SENIMAN, OLAHRAGAWAN;
- PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR,
- PENGARANG PENELITIAN, DAN PENERJEMAH;
- PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA TELEKOMUNIKASI,, ELEKTRONIKA, FOTOGRAFI, EKONOMI DAN SOSIAL
- AGEN IKLAN;
- PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK;
- PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT, KONFERENSI, PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA ATAU

- ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN & MAGANG DLL;
- PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN/PERANTARA
- DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING
- PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI YG TDK BERSTATUS SBG PEGAWAI;
- PENJAJA BARANG DAGANGAN YG TDK BERSTATUS PEGAWAI; DAN/ATAU
- PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI LAINNYA

*** JIKA MEMILIKI NPWP ATAU
IMBALAN YG DIBERIKAN
BERKESINAMBUNGAN
MAKA LIHAT KETENTUAN
PADA HALAMAN 12**

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

Contoh 1

Benny adalah penyanyi menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000,- atas
Penghitungan PPh Pasal 21

$$5\% \times \text{Rp}10.000.000) = \text{Rp}500.000,-$$

Jika Benny tidak memiliki NPWP, penghitungan PPh Pasal 21 :
 $(5\% \times 120\%) \times \text{Rp}10.000.000,- = \text{Rp}600.000$

Contoh 2

Polan adalah pelawak menerima honorarium sebesar Rp60.000.000,-
Penghitungan PPh Pasal 21 :

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}2.500.000,-$$

$$15\% \times \text{Rp}10.000.000,- = \text{Rp}1.500.000,-$$

PPh 21 yang harus dipotong Rp.4.000.000,-

Jika Polan tidak memiliki NPWP, penghitungan PPh Pasal 21 :
 $120\% \times \text{Rp}4.000.000 = \text{Rp}5.000.000$

T
u
g
a
s
4

Bagaimana jika jika Benny dan Polan memiliki NPWP?